

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan merupakan salah satu permasalahan yang terus menjadi perhatian, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, ironisnya, banyak masyarakat nelayan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini juga terjadi pada komunitas nelayan Bajo di Desa Popisi, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Masyarakat Bajo, yang dikenal sebagai komunitas maritim tradisional di Indonesia, sering menghadapi tantangan kemiskinan struktural yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketergantungan mereka pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama menjadikan mereka rentan terhadap perubahan ekosistem laut, seperti penurunan stok ikan akibat overfishing dan kerusakan terumbu karang.

Kemiskinan merupakan satu fenomena yang dialami oleh seseorang individu tanpa kerelaan dan kehendak mereka. Kemiskinan boleh dikategorikan kepada dua jenis yaitu material dan bukan material. Miskin material terdiri daripada miskin pendapatan dan bukan pendapatan yaitu pendidikan, akses kepada kesihatan, pekerjaan dan kemudahan awam. Manakala miskin bukan material ialah berkait berkenaan ciri-ciri sahsiah seperti emosi, psikologi dan rohani (Gopal et al., 2021).

Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah akses terbatas pada pendidikan, teknologi perikanan modern, dan pasar yang lebih luas, sehingga mereka sulit meningkatkan produktivitas maupun pendapatan. Selain itu, letak geografis pemukiman mereka yang sering kali terpencil memperburuk keterhubungan dengan infrastruktur dasar, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan.

Dalam konteks sosial, masyarakat Bajo cenderung menghadapi marginalisasi dalam kebijakan pembangunan, di mana program-program yang dirancang untuk pengentasan kemiskinan sering kali kurang memperhatikan kebutuhan spesifik komunitas nelayan. Sebagai hasilnya, mereka tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, diperburuk oleh minimnya keterampilan alternatif untuk diversifikasi pendapatan. Isu ini mencerminkan perlunya pendekatan holistik yang mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi dan keberlanjutan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat Bajo sekaligus menjaga ekosistem laut yang menjadi penopang hidup mereka.

Kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan Bajo secara umum mencerminkan kondisi multidimensional yang kompleks, di mana faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi. Secara internal, keterbatasan dalam akses pendidikan dan keterampilan membuat sebagian besar masyarakat Bajo hanya mampu mengandalkan perikanan tradisional, dengan peralatan sederhana dan hasil tangkapan yang tidak menentu.

Pendapatan yang rendah dari aktivitas ini sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama ketika musim paceklik tiba. Eksternalitas seperti kebijakan zonasi laut yang tidak berpihak atau monopoli distribusi hasil tangkapan oleh tengkulak semakin memperburuk situasi, memaksa nelayan Bajo untuk menjual hasil tangkapannya dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Selain itu, dampak perubahan iklim global, seperti peningkatan frekuensi badai dan naiknya permukaan air laut, mengancam habitat serta keberlangsungan aktivitas perikanan mereka. Banyak masyarakat Bajo yang terpaksa meninggalkan tradisi melaut dan mencari pekerjaan di darat, meski sering kali tanpa keterampilan yang memadai. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan penurunan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melemahkan identitas budaya masyarakat Bajo sebagai komunitas maritim.

Upaya pengentasan kemiskinan di kalangan nelayan Bajo membutuhkan kebijakan inklusif yang tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, konservasi ekosistem, serta integrasi mereka ke dalam pembangunan nasional.

Beragam penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat nelayan Bajo, seperti halnya nelayan tradisional lain di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang saling berkaitan. Secara struktural, ketergantungan kepada tengkulak dan sistem bagi hasil yang tidak adil memerangkap nelayan pada penghasilan rendah yang sulit ditingkatkan. Teknologi alat tangkap yang sederhana juga membatasi daya jelajah mereka, sehingga hasil tangkapan sering kali tidak mencukupi, apalagi dengan tekanan akibat overfishing dan kerusakan ekosistem laut. Secara kultural, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya akses terhadap informasi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas.

Banyak nelayan bahkan tetap bergantung pada praktik tradisional yang kurang efisien. Musim paceklik yang panjang, berkisar hingga delapan bulan dalam setahun, memaksa nelayan untuk berutang, yang kemudian melanggengkan lingkaran kemiskinan. Lebih jauh, kebijakan modernisasi perikanan yang lebih menguntungkan nelayan besar sering kali memperburuk marginalisasi nelayan kecil, termasuk komunitas Bajo, dengan mendorong eksploitasi yang tidak berkelanjutan tanpa mempertimbangkan kebutuhan mereka (Imron, 2003).

Menurut Studi yang dilakukan oleh Andi Rahmad (2018), tentang “Suku Bajo dan Kemiskinan” yang mengemukakan bahwa Kemiskinan yang dialami oleh nelayan Suku Bajo di Desa Saur Saibus disebabkan oleh faktor-faktor alamiah dan kultural. Kemiskinan ini termasuk jenis kemiskinan kultural, yang dipengaruhi oleh sikap dan kondisi lingkungan sekitar, sehingga mereka tetap berada dalam situasi tersebut. Selain itu, kondisi alam dan tradisi yang mereka anut juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kemiskinan para nelayan Suku Bajo di desa ini. Beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan struktural di kalangan nelayan Suku Bajo Desa Saur Saibus meliputi; *pertama*, rendahnya kualitas sumber daya manusia. *Kedua*, tradisi yang masih dipegang teguh oleh Suku Bajo. *Ketiga*, Minimnya alternatif pekerjaan selain melaut. *Keempat*, Keterbatasan kepemilikan modal usaha. *Kelima*,

Alat tangkap ikan yang sederhana. *Keenam*, Tidak adanya peran lembaga ekonomi untuk mendukung para nelayan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aksan, A., Moelyono, M., & Muis, A. (2022). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 1) Kemiskinan nelayan tradisional di Desa Kalupapi disebabkan oleh enam faktor, yaitu: kualitas sumber daya manusia, alternatif pekerjaan, modal kerja, teknologi yang digunakan, faktor kelembagaan, dan kebiasaan nelayan. Sementara itu, 2) Kemiskinan yang terjadi pada nelayan tradisional di Desa Kalupapi berupa kemiskinan alam dan budaya, dan 3) Program pengentasan kemiskinan bagi nelayan di Desa Kalupapi masih pada pemenuhan kebutuhan pokok dan akses terhadap pelayanan dasar, serta fasilitas alat tangkap.

Di Desa Popisi, tantangan yang dihadapi oleh nelayan Bajo semakin kompleks dengan adanya degradasi lingkungan laut akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim yang memengaruhi pola hasil tangkapan. Selain itu, keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan juga berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas nelayan. Ditambah dengan rendahnya akses terhadap program pemerintah, seperti subsidi atau pelatihan keterampilan, masyarakat Bajo di desa ini sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kajian mengenai kemiskinan nelayan Bajo di Desa Popisi penting untuk dilakukan guna memahami akar permasalahan yang mereka hadapi secara mendalam. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan Bajo. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang berbasis pada potensi lokal dapat dioptimalkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Kearifan Lokal Suku Bajo

Sebagai suku bangsa maritim, orang Bajo yang identik dengan bermukim di atas laut kini telah mengalami perubahan, hal ini jelas terlihat pada pemukiman orang Bajau di Banggai Laut, Mola Wakatobi dan Bajoe di Bone. Tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan itu adalah konsekuensi dari proses aktifitas penyesuaian yang dilakukan orang Bajau agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Setidaknya ada dua lingkungan yang sudah akrab dengan kehidupan orang Bajau. Sebagai contoh pertama, orang Bajau yang awalnya dikenal sebagai “manusia perahu” yang notabene totalitas dari hidupnya dengan kebudayaan yang berorientasi dengan laut. Oleh karena itu, dengan kebudayaannya akan memberi peluang dalam terwujudnya situasi yang homeostatis (keseimbangan). Kondisi inilah yang cenderung akan dipertahankan dan sudah menjadi bagian dari kebudayaan yang tidak akan ditinggalkan. Kedua, lingkungan yang masih asing bagi orang Bajau yang memungkinkan mereka berhadapan dengan situasi stress dan terpaksa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Situasi ini juga cukup membantu orang Bajau untuk bertahan hidup dalam lingkungan air (aquatic environment) yang mau tidak mau beradaptasi atau bergeser ke lingkungan darat.

Fenomena bermukim orang Bajau di atas air merupakan adaptasi dengan lingkungan laut sebagai bentuk bermukim alamiah (natural dwelling) yang bersifat

pribadi (private dwelling) yang akhirnya membentuk perkampungan dengan upaya penimbunan atau reklamasi pantai sebagai bentuk budaya bermukim atau pembentukan ruang bagi kehidupan manusia. Pembentukan ruang baru senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai budaya yang dipahami oleh orang Bajau.

Seperti hasil penelitian Syahriana Syam (2021) pemukiman Bajau di Teluk Bone selalu menarik, karena adanya pathok di sekitar hunian yang mereka istilahkan pathok sambuangan taguk pulih. Meskipun hunian orang Bajau telah mengalami perubahan dari laut ke darat, namun pathok dianggap sebagai simbol lokasi hunian Bajau. Perkembangan konsep pemukiman ini sejak membuat pathok adalah bentuk dari mallabu yang kemudian membentuk kampoh atau perkampungan orang Bajau. Meskipun perubahan terus menerus masuk dalam kehidupan orang Bajau, namun orang Bajau berusaha mempertahankan tradisi atau kearifan lokal dalam praktek kehidupannya terutama berkenaan dengan sumber matapencahariannya yang masih menghormati laut. Pemanfaatan dan keberlanjutan ekosistem laut tetap terpelihara, orang Bajau memanfaatkan sumberdaya laut tidak berlebihan (over eksploitasi). Hal ini didasari prinsip-prinsip kearifan lokal seperti pantangan atau larang (pamali) dalam interkasinya dengan lingkungan laut.

Suku Bajau memandang laut sebagai bagian tak terpisahkan dari diri mereka, mencerminkan hubungan yang mendalam dan penuh cinta akibat interaksi yang berkelanjutan. Mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari laut, hidup di dalamnya, dan menjadi penguasa lautan (mbombonga di lao). Bagi Bajau, laut memiliki peran yang sangat penting: sebagai sumber rezeki, kebaikan, kesehatan, bahkan penyakit, sekaligus pelindung dari berbagai bencana. Dalam filosofi hidup mereka, laut adalah segalanya ibarat ladang bagi masyarakat daratan, halaman rumah, dan ruang kehidupan, sehingga seluruh aspek kehidupan mereka berpusat di laut.

Sebagai kelompok yang totalitas hidupnya di laut dan mempertahankan hidupnya di laut, sudah pasti laut sangat berbeda dengan kehidupan di darat. Oleh sebab itu, laut inilah yang membentuk karakter kemaritiman orang Bajau. Namun demikian, antropolog yang meneliti kebudayaan maritim James M Acheson (1981), mengemukakan bahwa kondisi laut menjadi pembentuk karakter manusia yang memiliki ketergantungan dengan lingkungan laut. Setidaknya membentuk karakter yang khas yang membedakan dengan kebudayaan orang-orang yang berorientasi darat. Dalam penelitiannya, mengatakan:

Kegiatan melaut (fishing) terjadi pada lingkungan yang heterogen dan tidak menentu. Ketidaktentuan ini tidak hanya berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial di mana kegiatan melaut dilakukan.

Laut adalah dunia yang berbahaya dan asing, di mana manusia diperlengkapi secara minimal (poor) untuk bertahan hidup. Laut adalah dunia di mana manusia hanya bisa memasukinya dengan bantuan alat buatan (perahu, alat selam, dll), itupun jika cuaca dan kondisi laut memungkinkan. Ancaman yang konstan dari ombak kencang, kecelakaan, dan kerusakan mekanis membuat kegiatan melaut menjadi pekerjaan yang paling membahayakan....

Ekosistem laut mencakup berbagai zona ekologis yang dihuni oleh beragam spesies dengan pola hidup yang berbeda-beda. Ikan cenderung berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam ruang tiga dimensi, mengikuti perubahan musim, dengan jumlah yang sering kali fluktuatif dan sulit diprediksi, terutama bagi nelayan kecil. Kondisi laut dan sumber dayanya yang dinamis ini menjadikan kehidupan para nelayan penuh tantangan dan ketidakpastian.

Secara psikologis, para nelayan menghadapi tekanan dari tingkat risiko kerja yang tinggi serta kondisi kerja dalam ruang sempit (perahu/kapal) di lingkungan yang umumnya didominasi laki-laki. Tekanan dari lingkungan laut dan situasi kerja ini sering kali menyebabkan pola kehidupan rumah tangga nelayan berbeda dari standar komunitas dengan jenis pekerjaan lain, yang terkadang memunculkan masalah. Jam kerja nelayan yang tidak selaras dengan kegiatan masyarakat umum misalnya bekerja di malam hari dan beristirahat di siang hari serta seringnya mereka tidak hadir di komunitasnya membuat kepentingan mereka kurang terwakili dalam dunia politik. Kondisi ini juga menjadikan nelayan sangat bergantung pada pemilik kapal dan tengkulak, yang sering mengeksploitasi mereka.

Berdasarkan argumen tersebut, kebudayaan dapat dipahami sebagai alat adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, kebudayaan yang ideal untuk beradaptasi dengan karakteristik laut atau maritim seharusnya tidak hanya mencerminkan kemampuan manusia untuk menaklukkan tantangan laut guna mengakses dan memanfaatkan kekayaannya, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang mendukung pelestarian dan perlindungan laut dari ancaman degradasi atau kerusakan. Karakter inilah yang menjadi ciri utama masyarakat Bajo sebagai pewaris kebudayaan maritim hingga saat ini.

Masyarakat Bajo menghadapi kesulitan untuk meninggalkan lingkungan laut dan pekerjaan mereka demi beralih ke sektor-sektor ekonomi di darat. Hal ini disebabkan oleh adaptasi mereka yang mendalam dengan lingkungan laut, yang mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya. Adaptasi fisiologis meliputi penyesuaian indera penciuman, penglihatan, pendengaran, ukuran rongga pernapasan, dan mungkin juga tekanan darah. Sementara itu, adaptasi psikologis mencakup kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai karakteristik laut, seperti badai, ombak, ketenangan, suhu, iklim, pemandangan terbuka, dan bahkan perilaku biota laut.

Adaptasi sosial dan budaya masyarakat Bajo terhadap lingkungan laut menciptakan pola pandang dan sikap yang memposisikan laut sebagai habitat dan biota yang menjadi subjek interaksi, bukan sekadar objek untuk dipelajari dan dieksploitasi. Pola adaptasi yang kompleks dan ekstrem ini membuat orang laut atau manusia perahu sulit keluar dari dunia baharinya. Mereka sering kali merasa kebingungan ketika harus beralih ke berbagai bentuk usaha ekonomi di darat. Sebagian besar komunitas Bajo, di mana pun berada, memiliki keterikatan mendalam dengan lingkungan laut. Proses memasuki dan memanfaatkan sumber daya serta jasa yang disediakan laut mengharuskan, bahkan menuntut, adanya kerja sama dan kehidupan kolektif yang terlembaga. Faktor-faktor seperti bahaya di laut,

perilaku spesies biota tangkapan, berat dan rumitnya pekerjaan, serta kebutuhan mendesak akan modal dan biaya yang tidak dapat ditanggung sendiri menjadi alasan utama pentingnya kelembagaan dan kehidupan kolektif dalam masyarakat maritim di Indonesia.

1.2.2. Penyebab Kemiskinan Nelayan

Kemiskinan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki akar penyebab yang dapat dikenali. Selain faktor alamiah, seperti cuaca buruk yang menghambat aktivitas melaut para nelayan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh pola kebiasaan atau budaya yang berkembang di tengah masyarakatnya. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan menjadi hal yang sangat penting.

Menurut Tain (dalam Suryaningsi, 2017:51-52), Kemiskinan pada nelayan dikelompokkan menjadi tiga bentuk kemiskinan berdasarkan faktor pembentuknya. *Pertama*, kemiskinan struktural dikondisikan karena struktur sosial yang ada menjadikan mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia, juga akibat tatanan kebijakan yang lebih menguntungkan golongan pemilik modal (nelayan besar). Kekuatan-kekuatan di luar rumah tangga nelayan kecil menjadikan mereka terpinggirkan dan hidup dalam belunggu kemiskinan, sehingga adanya ketimpangan dalam mengakses sumberdaya yang disebabkan struktur sosial yang ada. *Kedua*, kemiskinan kultural terjadi karena faktor budaya seperti kemalasan yang bersumber pada nilai-nilai budaya lokal yang memang tidak kondusif bagi suatu kemajuan.

Hal ini tidak terlepas dari budaya yang diterapkan dalam rumah tangga masyarakat nelayan. *Ketiga*, kemiskinan alamiah terjadi di mana kondisi alam yang tidak mendukung mereka melakukan kegiatan ekonomi produktif ataupun perilaku produksi yang tidak produktif akibat sifat sumber daya yang bersangkutan. Dalam konteks masyarakat nelayan, dapat digambarkan akibat laut dipandang sebagai *common property* dan akses terbuka menjadikan perikanan laut dieksploitasi secara berlebihan bahkan dengan alat dan bahan terlarang. Para nelayan berperilaku untuk saling mendahului dan berupaya memperoleh hasil tangkapan lebih banyak dibanding nelayan lain. Bahkan sebagian dari mereka menggunakan alat atau bahan terlarang tanpa berfikir masalah keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada.

Ketiga bentuk kemiskinan ini saling berinteraksi dan menciptakan lingkaran masalah yang kompleks, di mana satu jenis kemiskinan sering kali memperkuat jenis lainnya. Misalnya, ketimpangan struktural dapat memperkuat pola budaya yang tidak produktif, sementara eksploitasi sumber daya akibat tekanan ekonomi semakin memperburuk kondisi alam. Situasi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat nelayan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan lingkungan yang saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memutus lingkaran ini. Pendekatan terintegrasi yang mencakup reformasi kebijakan untuk menciptakan keadilan struktural, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengubah pola budaya, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menjadi kunci

penting dalam menciptakan solusi jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat meningkat secara signifikan dan merata.

Menurut studi yang dilakukan Hamdani, H., dan Wulandari, K. (2017) tentang "Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional", dalam tulisannya menjelaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia, ditandai oleh tingkat pendidikan yang rendah, berdampak langsung pada rendahnya produktivitas dan pendapatan nelayan tradisional, yang kerap masuk dalam kategori masyarakat miskin. Ketergantungan nelayan pada kemurahan alam membuat pekerjaan mereka tidak stabil, sehingga penghasilan sulit mencukupi kebutuhan harian dan sering memaksa mereka berutang. Kebiasaan konsumtif tanpa mempertimbangkan masa depan, keterbatasan modal usaha, dan teknologi tradisional semakin memperparah situasi, menghambat peningkatan produksi maupun pendapatan. Selain itu, ketiadaan lembaga ekonomi atau perkumpulan nelayan untuk mendukung pemasaran hasil tangkapan dan kebutuhan lainnya membuat kondisi nelayan tradisional semakin terpuruk.

Terdapat 15 faktor dominan penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan kecil di wilayah tangkap lebih yaitu faktor kelembagaan yang merugikan nelayan kecil, program yang tidak memihak nelayan kecil, pandangan hidup yang berorientasi akherat saja, keterbatasan sumberdaya, ketidak sesuaian alat tangkap, rendahnya investasi, terikat utang, perilaku boros, keterbatasan musim penangkapan, kerusakan ekosistem, penyerobotan wilayah tangkap, lemahnya penegakan hukum, kompetisi untuk mengguguli nelayan lain, penggunaan alat/ bahan terlarang serta perilaku penangkapan. Ke-15 faktor dominan tersebut mampu menjelaskan sebesar 72,017% terhadap keseluruhan faktor penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan. Dari 15 faktor dominan penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan dapatlah diketahui bahwa pada hakekatnya kemiskinan yang membelenggu rumah tangga nelayan adalah kemiskinan yang menyangkut multidimensi (Tain, 2011).

Pendapat lain mengatakan, Dalam sebuah karya Suherman Rosyidi (2011:148), menjelaskan bahwa kemiskinan dibagi menjadi dua macam. Pertama, kemiskinan subjektif dan objektif. Kemiskinan subjektif merupakan kemiskinan yang berlaku secara individual. Kemiskinan jenis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sejumlah harta maupun dengan kemampuan mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan. Kedua, kemiskinan subjektif tidak dapat diukur, dan hanya dapat dirasakan yang bersangkutan saja. Kemiskinan objektif merupakan kemiskinan yang berhubungan dengan perasaan. Sedangkan kemiskinan objektif berhubungan dengan pandangan orang banyak. Seseorang dikatakan kaya jika orang tersebut merasa miskin dan dikatakan kaya jika orang tersebut merasa kaya, bukan karena orang lain mengatakan demikian. Tidak peduli seberapa banyak atau sedikit hartanya. Jika seseorang itu sudah merasa cukup dan tidak banyak lagi yang diperlukan, maka sebenarnya orang itu adalah orang kaya. Demikian pula, jika seseorang merasa belum cukup dan masih banyak kebutuhannya yang belum terpenuhi, orang itu sebenarnya miskin.

Chambers dalam Nasikun menyatakan, kemiskinan dibagi kedalam empat bentuk, antara lain:

1. Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Jika pendapatan yang diterima oleh individu berada kurang dari rata-rata atau ada kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu untuk mencukupi keperluan dasar (pangan, sandang, papan serta pendidikan).

2. Kemiskinan relatif

Merupakan suatu keadaan miskin yang disebabkan karena adanya dampak dari kebijakan pembangunan masih belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hingga menimbulkan adanya kesenjangan pendapatan, dengan kata lain seseorang yang hidupnya berada diatas garis kemiskinan, tetapi masih ada di bawah kapasitas orang lain.

Jadi, apabila semakin luas kesenjangan antara taraf kehidupan kelompok atas dan kelompok bawah akan semakin bertambah banyak jumlah masyarakat digolongkan kelompok miskin. Juga bisa dikatakan orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar namun masih jauh lebih rendah dibanding dengan keadaan masyarakat sekitar, maka orang tersebut masih dianggap miskin.

3. Kemiskinan kultural

Kemiskinan ini tertuju kepada permasalahan perilaku individu dan sekelompok warga yang ditimbulkan karena adanya pengaruh budaya, misalnya sikap yang malas, pemboros serta tidak mau kreatif.

4. Kemiskinan Struktural

Kondisi miskin karena kurangnya jalan bagi sumber daya yang disebabkan karena sistem sosial budaya dan politik yang masih tidak mendorong adanya penghentian kemiskinan.¹² Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kemiskinan tersebut diantaranya adalah pendapatan per kapita, keadaan gizi, kecukupan pangan dan tingkat kesehatan keluarga yang sering diukur dari rata-rata kematian bayi.

Berdasarkan hal tersebut, Kemiskinan menjadi persoalan multidimensi yang mencakup aspek subjektif dan objektif. Kemiskinan subjektif berhubungan dengan perasaan individu terhadap kecukupan kebutuhan hidupnya, terlepas dari jumlah harta yang dimiliki. Kemiskinan jenis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena hanya dapat dirasakan oleh individu tersebut. Di sisi lain, kemiskinan objektif diukur melalui standar sosial dan persepsi masyarakat, di mana seseorang dinilai miskin atau kaya berdasarkan indikator yang dapat dilihat oleh orang lain, seperti harta benda atau penghasilan.

Pembagian kemiskinan menurut Chambers dalam Nasikun lebih memperinci karakteristiknya menjadi empat bentuk: kemiskinan absolut, relatif, kultural, dan struktural. Kemiskinan absolut menggambarkan individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pendidikan. Jenis

kemiskinan ini diukur dengan membandingkan pendapatan individu terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, kemiskinan relatif menggambarkan ketimpangan sosial, di mana seseorang dianggap miskin karena memiliki pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata masyarakat di sekitarnya.

Kemiskinan kultural lebih bersifat perilaku dan budaya, di mana individu atau kelompok tertentu terjebak dalam pola hidup yang kurang mendukung peningkatan ekonomi, seperti sifat malas, boros, dan kurang kreatif. Faktor budaya ini seringkali menjadi penghambat utama untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan struktural, di sisi lain, disebabkan oleh sistem sosial, budaya, dan politik yang tidak mendukung pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang, sehingga menciptakan ketimpangan yang sistemik.

Indikator-indikator kemiskinan, seperti pendapatan per kapita, tingkat gizi, kecukupan pangan, dan tingkat kesehatan, menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini menuntut pendekatan yang holistik untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari pemberian akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hingga perbaikan sistem sosial dan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan demikian, untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan upaya terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada pemberdayaan ekonomi tetapi juga perubahan budaya dan perbaikan kebijakan sosial. Penyelesaian masalah kemiskinan harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu, untuk menciptakan kondisi yang adil, setara, dan mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan.

1.2.3. Pengentasan Kemiskinan Nelayan Bajo

Ketimpangan sosial yang semakin tajam menjadi kenyataan yang mencolok dalam komunitas nelayan. Sebagian kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki alat tangkap ikan modern seperti pukat dan sejenisnya, menikmati keuntungan besar dari sumber daya perikanan. Kelompok ini didukung oleh perlindungan hukum dan perizinan yang kuat. Sebaliknya, mayoritas nelayan tradisional tetap terjebak dalam kemiskinan. Kondisi ini sering kali memicu konflik, baik dalam bentuk terbuka maupun gerakan tersembunyi, sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak dan inkonsistensi aparat dalam menerapkannya. Dalam menghadapi ancaman terhadap mata pencaharian mereka, para nelayan menunjukkan berbagai respon, mulai dari sikap pasif hingga tindakan fisik yang melibatkan massa secara terbuka. Oleh karena itu, pentingnya upaya dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan untuk masyarakat tersebut.

Menurut studi yang dilakukan Cahyandi, K., & Hartanto, D. R. (2024), Upaya Pengentasan kemiskinan pada masyarakat nelayan dapat diwujudkan melalui strategi pemberdayaan nelayan skala kecil melalui penguatan kelembagaan seperti koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di daerah terpencil. pemberdayaan yang berfokus pada penguatan kelembagaan, seperti pembentukan dan pengelolaan koperasi nelayan. Koperasi ini dapat berperan

sebagai wadah untuk meningkatkan akses terhadap modal, alat tangkap, serta pasar yang lebih luas bagi nelayan skala kecil. Dengan dukungan kelembagaan yang kokoh, nelayan tidak hanya mampu memperbaiki taraf hidup mereka tetapi juga mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau pihak lain yang sering merugikan. Pendekatan ini menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah terpencil, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Isdaini (2022) menyoroti langkah-langkah pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di Desa Kembangragi. Dalam pendekatan ini, masyarakat nelayan dilibatkan secara langsung melalui berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Program-program tersebut mencakup pelatihan keterampilan, pengelolaan sumber daya lokal, hingga pendampingan dalam membangun akses ke pasar yang lebih luas. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, inisiatif ini bertujuan menciptakan kemandirian sekaligus memperkuat ekonomi komunitas secara berkelanjutan.

Hasil dari program pemberdayaan ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam pola hidup masyarakat nelayan, termasuk peningkatan pendapatan dan diversifikasi mata pencaharian. Proses partisipatif yang diterapkan mendorong munculnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Model pemberdayaan seperti ini menjadi contoh bahwa pelibatan aktif masyarakat merupakan kunci penting dalam menekan angka kemiskinan, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada sektor perikanan.

Prof. Dr. Henry J.D. Tamboto dan Dr. Allen A.C. Manongko (2019) mengemukakan bahwa pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dapat dilakukan melalui peningkatan literasi ekonomi dan penguatan modal sosial. Literasi ekonomi memungkinkan masyarakat pesisir memahami cara mengelola sumber daya mereka secara efektif, termasuk dalam merencanakan keuangan, mengelola usaha kecil, serta mengakses peluang pasar. Di sisi lain, modal sosial yang meliputi jaringan komunitas dan dukungan kolektif menjadi faktor penting untuk memperkuat kolaborasi dan solidaritas antarindividu. Kedua elemen ini saling melengkapi, menciptakan dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan antaranggota komunitas. Dukungan kolektif dari jaringan komunitas, seperti kelompok usaha bersama atau koperasi, memberikan akses lebih mudah terhadap sumber daya dan informasi. Dengan memadukan literasi ekonomi dan modal sosial, masyarakat pesisir mampu membangun ekosistem yang mendukung pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan. Strategi ini terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengurangan kemiskinan, khususnya di daerah yang mengandalkan sektor perikanan sebagai tumpuan utama kehidupan.

Dari berbagai studi yang telah dilakukan, upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat nelayan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan

berbasis komunitas. Strategi pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan, seperti koperasi nelayan, menjadi salah satu langkah signifikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mengakses modal, alat tangkap, dan pasar, tetapi juga mampu mengurangi ketergantungan pada pihak yang sering merugikan. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, nelayan di daerah terpencil dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan literasi ekonomi dan penguatan modal sosial, juga memainkan peran penting dalam menekan angka kemiskinan. Literasi ekonomi membantu masyarakat nelayan memahami pengelolaan sumber daya dan keuangan, sementara modal sosial, berupa jaringan komunitas dan dukungan kolektif, memperkuat kolaborasi dan solidaritas. Pendekatan ini menjadi lebih efektif ketika melibatkan partisipasi aktif masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Isdaini (2022). Dengan demikian, kombinasi antara pemberdayaan ekonomi berbasis kelembagaan, literasi ekonomi, dan modal sosial dapat menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu mendukung pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan.

Amartya Sen (1999) berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya sekadar ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga keterbatasan dalam akses terhadap peluang dan kebebasan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas individu, yaitu kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Kemiskinan bukan hanya sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi juga sebagai hambatan terhadap kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bermakna. Dalam pendekatan *Capability Approach*-nya, ia menekankan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang tidak memiliki kebebasan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi sosial dan politik. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan pendapatan, tetapi harus difokuskan pada upaya memperluas pilihan dan kesempatan bagi individu untuk berkembang. Misalnya, seorang anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas akan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan meskipun ekonomi negara mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif harus menitikberatkan pada peningkatan kapabilitas individu, seperti penyediaan layanan kesehatan universal, pendidikan inklusif, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial. Dengan cara ini, pengentasan kemiskinan bukan hanya sekadar membantu orang keluar dari kondisi ekonomi yang sulit, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kebebasan nyata untuk menentukan dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

1.3. Masalah penelitian

Berdasarkan kondisi realitas sosial atas sebuah fenomena kemiskinan yang dialami nelayan Bajo di Banggai Laut, maka lingkup penelitian ini difokuskan pada kondisi kemiskinan nelayan dengan melihat secara holistik dan terintegratif tentang dimensi

kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan demografi sehingga kemiskinan terjadi secara berkelanjutan meskipun telah diintervensi dengan berbagai program pemerintah daerah yang dilihat. Dengan fokus penelitian tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan tiga pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kategori kemiskinan yang dialami oleh Nelayan Bajo di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut?
2. Faktor-faktor Sosial Budaya apa saja yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan nelayan Bajo di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut
3. Bagaimana nelayan Bajo di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut bertahan dalam kemiskinaan?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya kemiskinan yang dialami nelayan Bajo di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kategori kemiskinan nelayan Bajo di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut; (2) mengetahui dan menganalisis struktur sosial yang menjadi penyebab kemiskinan nelayan Bajo di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut; dan (3) mengetahui dan menganalisis makna kemiskinan yang dialami nelayan Bajo di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut dan strategi bertahan hidup dengan kemiskinan.

Konsep kemiskinan menurut Amartya Sen sangat relevan dalam konteks kemiskinan nelayan Bajo, yang tidak hanya terjebak dalam keterbatasan ekonomi, tetapi juga dalam terbatasnya akses terhadap peluang dan kebebasan untuk menentukan arah hidup mereka. Sebagai kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya laut, nelayan Bajo sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas. Dalam perspektif Sen, pengentasan kemiskinan bagi nelayan Bajo tidak cukup hanya dengan meningkatkan pendapatan mereka melalui bantuan langsung, tetapi harus melibatkan peningkatan kapabilitas mereka, seperti pemberian akses yang lebih besar terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan infrastruktur yang memadai. Dengan memperluas kebebasan dan kesempatan bagi nelayan Bajo untuk mengakses peluang yang lebih baik, mereka dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjalani kehidupan yang mereka nilai sebagai suatu kemajuan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki manfaat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan kemajuan masyarakat, diantaranya:

- Secara akademis, penelitian memungkinkan untuk mengeksplorasi dan memahami masalah budaya kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan.

Melalui penelitian, penemuan-penemuan baru dapat dilakukan, dan pengetahuan dapat diperluas khususnya bagi keilmuan antropologi.

- Secara praktis, penelitian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti, dimana penelitian menyediakan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai bidang, termasuk di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang mendeskripsikan kebudayaan kemiskinan nelayan di Kabupaten Banggai Laut dalam memanfaatkan sumberdaya laut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2006:6).

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan- kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain, sehingga pada penelitian akan mendeskripsikan lebih mendalam terkait dengan kemiskinan pada masyarakat nelayan di Desa Popisi, Kabupaten Banggai Laut.

2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut sebagai lokasi pemukiman nelayan Bajo yang hidup dalam kemiskinan. Secara metodologi alasan memilih lokasi penelitian ini menjadi lokasi representasi nelayan yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang susah dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Banggai Laut.



Gambar 1. *Peta Kabupaten Banggai Laut*

Lokasi ini menjadi salah satu wilayah pemukiman orang Bajo selain wilayah-wilayah lain di Kabupaten Banggai Laut. Di Lokasi ini juga mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup di laut dan bekerja sebagai nelayan. Akan tetapi, realitas yang terjadi di tengah masyarakat tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banggai Laut, masih sangat tinggi hal ini seralasan dengan hasil data Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan tahun 2020, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Status Miskin, dan Jenis Kelamin, Maret 2020

No.	Jenis Kelamin	Miskin	Tidak Miskin
1.	Laki-Laki	96,30%	84,44%
2.	Perempuan	3,70%	15,56%
Total		100,00%	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Laut, Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Banggai Laut

Pada Maret 2020, data menunjukkan distribusi persentase kepala rumah tangga berdasarkan status miskin dan jenis kelamin. Dari keseluruhan kepala rumah tangga yang termasuk kategori miskin, mayoritas adalah laki-laki dengan persentase mencapai 96,30%. Sementara itu, kepala rumah tangga perempuan dalam kategori yang sama hanya menyumbang 3,70%.

Sebaliknya, pada kelompok kepala rumah tangga yang tidak termasuk dalam kategori miskin, laki-laki masih mendominasi dengan persentase sebesar 84,44%. Namun, kepala rumah tangga perempuan yang tidak tergolong miskin menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan kategori miskin, yaitu sebesar 15,56%. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun laki-laki lebih banyak berperan sebagai kepala rumah tangga di kedua kategori, perempuan cenderung lebih terwakili dalam kelompok kepala rumah tangga yang tidak miskin dibandingkan kelompok miskin. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang perlu diperhatikan dalam konteks kemiskinan dan distribusi peran kepala rumah tangga.

2.3. Informan Penelitian

Awalnya, para peneliti antropologi mengumpulkan data dari tangan pertama (*first hand*) yaitu informan terpilih tentang cara di mana sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan dan menggantungkan hidupnya dengan laut. Dari informasi yang diperoleh itu, peneliti kemudian memperoleh gambaran mengenai dunia persepsi dan kultural mereka. Informan atau orang yang diteliti bukan sebagai subjek, sebagaimana diperankan di studi-studi kualitatif yang lain, melainkan merekalah para ahli di mana para peneliti antropologis berupaya memperoleh pengetahuan dari dan tentang mereka.

Adapun Informan dari penelitian ini adalah nelayan Bajo, punggawa, istri-istri nelayan Bajo, tokoh budaya, aparat keamanan, dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan wilayah yang menjadi lokasi penelitian.

DAFTAR INFORMAN			
No.	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Sadri Ambi	Laki-Laki	Nelayan
2.	Hambros	Laki-laki	Nelayan
3.	Luhan	Laki-Laki	Nelayan
4.	Serdin	Laki-laki	Nelayan
5.	Dirman	Laki-laki	Nelayan
6.	Sunaria	Perempuan	Istri Nelayan
7.	Risna	Perempuan	Istri Nelayan
8.	Amina Galus	Perempuan	Istri Nelayan
9.	Sriwarni	Perempuan	Istri Nelayan
10.	Ratna	Perempuan	Istri Nelayan
11	Rendra	Laki-Laki	Nelayan

Tabel 2. Daftar Informan

2.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah informan dan keadaan di lokasi penelitian. (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Seperti instansi pemerintahan, swasta, dan organisasi masyarakat yang umumnya terkait data-data kuantitas (biasanya berupa data angka), atau dokumen-dokumen dari instansi terkait.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan meliputi: *Pertama*, terlibat langsung dalam seluruh rangkaian kegiatan yang diteliti melalui observasi atau pengamatan berpartisipasi (*participant observation*) seperti pertemuan atau dengan nelayan di Desa Popisi Kabupaten Banggai Laut. Mendokumentasikan aktifitas melalui kamera dan foto. Melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menyusun pedoman wawancara. Tema-tema wawancara seperti aktifitas penangkapan ikan, kehidupan rumah tangga, dan kehidupan sosial ekonomi sehari-hari nelayan Bajo. Melakukan perekaman wawancara untuk ditranskrip dan selanjutnya dianalisis. *Filed Note* atau catatan lapangan, merupakan suatu bentuk laporan yang akan ditulis selama di lapangan, seperti coretan, curahan pikiran, maupun pengalamannya selama meneliti.

2.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut; Pertama, Merapikan data-data penelitian baik yang berupa transkrip wawancara, dokumentasi foto atau video, dan catatan-catatan kecil dari hasil observasi di lapangan; Kedua, melakukan *coding data* secara keseluruhan terhadap data dasar yang telah diperoleh di lapangan; Ketiga, Melakukan analisis data dari hasil *coding data* yang telah dilakukan sebelumnya; Keempat, hasil analisis

dibuatkan tema berdasarkan pertanyaan penelitian yang hendak di jawab; dan Kelima, menulis laporan penelitian secara deskriptif, naratif, dan holistik.

2.7. Etika Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti mengurus izin secara formal dari kampus kepada Pemda Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, serta kepada informan penelitian ini. Selama proses penelitian, saya menyampaikan maksud dan tujuan penelitian kepada semua informan. Peneliti meminta persetujuan informan akan dilakukannya perekaman dan penyebutan nama. Pada penelitian ini, semua informan menyatakan bersedia untuk direkam dengan menggunakan aplikasi rekam yang ada di ponsel.